

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan analisis kontribusi PKB dan BBNKB periode 2009-2013 yang dilakukan di Dispenda Provinsi Jawa Timur UPTD Surabaya Utara, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun PKB dan BBNKB memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu berkisar antara 40% sampai 60% dari total PAD secara keseluruhan di UPTD Surabaya Utara. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Persentase penerimaan PKB dan BBNKB di UPTD Surabaya Utara selama 5 tahun terakhir terus berubah-ubah, mengalami kenaikan dan penurunan namun persentase penerimaan tidak memiliki perbedaan yang jauh. Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa persentase penerimaan PKB dan BBNKB di UPTD Surabaya Utara selama 5 tahun terakhir sebagian besar mencapai target yang telah ditentukan.
3. Dalam melakukan tugasnya untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, petugas Samsat dan Dispenda UPTD Surabaya Utara sering mengalami beberapa macam hambatan antara lain: Dalam proses pencairan tunggakan, UPTD Surabaya Utara

mengalami kesulitan, hal ini dikarenakan adanya daerah surplus yaitu daerah yang mudah menghasilkan pencairan tunggakan kendaraan bermotor dan daerah minus, yaitu daerah yang sulit menghasilkan pencairan tunggakan kendaraan bermotor. Selain itu potensi obyek kendaraan bermotor tidak sama setiap daerah ada yang besar dan kecil, adanya alasan klasik dari para wajib pajak bilamana diberikan surat perpajakan adalah tidak punya atau belum punya uang, para petugas dinas luar dalam memberikan laporan status kendaraan bermotor banyak yang tidak valid, dalam arti bahwa kendaraan yang seharusnya sudah dijual tetapi masih distatus dimiliki, sehingga masih menjadi piutang dan menjadi tunggakan.

4. Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan upaya untuk mempermudah evaluasi dibentuk kelompok. Penentuan kelompok berdasarkan wilayah/ kecamatan. dipadukan antara kecamatan surplus s/d kecamatan minus dalam pencairan tunggakan. Dalam melakukan upaya ini, kerjasama tim dalam kelompok diutamakan untuk pencapaian target secara optimal. Selain itu petugas melakukan sosialisasi ke masyarakat wilayah kecamatan yang tunggakan pajaknya dinilai masih tinggi, dalam melaksanakan sosialisasi ini, masyarakat diberi pemahaman akan kemudahan-kemudahan dalam proses pembayaran pajak kendaraan melalui layanan-layanan unggulan seperti

layanan samsat keliling, samsat corner, samsat payment point dan layanan e-samsat.

1.2. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Surabaya Utara:

1. Petugas Dispenda harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan menjalin komunikasi dengan mengadakan sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor.
2. Pengiriman SPKPKB dapat dilakukan via email. Pengiriman via email ini tidak harus diberikan ke seluruh wajib pajak, mengingat tidak semua wajib pajak mengerti internet, akan tetapi akan diprioritaskan pada corporate atau perorangan yang memiliki kendaraan bermotor relatif banyak. Dari pemberitahuan via email ini, wajib pajak dapat memberikan informasi akan status kendaraan yang terdapat pada perusahaan atau orang pribadi tersebut, sehingga status kendaraan ini dapat dikatakan valid.
3. Petugas Samsat maupun Dispenda harus mermudah sistem pembayaran pajak, dengan cara membuka lokasi pembayaran di tempat-tempat yang mudah di jangkau dan menempatkan mobil samsat keliling di daerah-daerah yang jauh dari samsat sehingga aksesnya pembayarannya lebih mudah.

4. Bekerja sama dengan pihak kepolisian agar pihak kepolisian tidak hanya memeriksa STNK, tetapi juga melihat faktur pajak yang ada di balik STNK. Jika pajak kendaraan tersebut belum di bayarkan lebih dari 2 tahun, pihak kepolisian juga bisa menilang kendaraan tersebut untuk memicu timbulnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Endro Suwarno dan Suhartiningsih. 2008. "Efektifitas evaluasi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7 No. 2, Pp 162-173.
- Bianchi M, Boyle M dan Hollingsworth D. 1999. "A comparison of methods for trend estimation". *Applied Economics Letters*, Vol.6 No.2 Pp 103-109.
- Chatfield, C. 1993. "Calculating Interval Forecasts". *Journal of Business and Economic Statistics*, Vol. 11 No.2 Pp 121-135.
- Febriati. 2011. "Analisis sistem pengendalian pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD pada dispenda kota Sikawang". *Jurnal ekonomi sosial*, Vol 7 No.2, Pp 165-185.
- Gustin Fajar Ria dan H. Herman Legowo. 2008. "Analisis efektivitas, efisiensi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (Studi Kasus Pada BPKD Provinsi D.I.Yogyakarta)".
- Himawan Estu Bagijo. 2012. "Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah (studi kasus di kabupaten/kota dan pemerintah propinsi di Jawa timur)". *Jurnal bidang hukum dan konstitusi provinsi Jawa Timur*.
- Hunger dan Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi.
- Ibnu Syamsi. 1994. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ida Zuraida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas dan Burton. 2010. *Hukum pajak*. Edisi 5. Jakarta: Selemba Empat.
- Lili syafitri dan kardinal. 2012. Analisis peranan dan kontribusi pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota jambi.
- Mudrajad Kuncoro. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Mudrajad Kuncoro. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.13 tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.1 tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa.
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Resmi Siti. 2013. *Perpajakan*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sofi Nurmanto. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Suandy Erly. 2002. *Perpajakan Jakarta*: Selemba Empat.
- Tony Marsyahrul. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Gresindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku II*. Jakarta:Selemba Empat.

